ANALISIS SUMBER-SUMBER PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PROVINSI SUMATERA UTARA BERBASIS NILAI DAKWAH

Alda Eliya Nasution¹, Syahrina Zahara Lubis², Hari Jaya Sinaga³, Nasirwan⁴

Universitas Negeri Medan

e-mail: aldaeliya06@gmail.com¹, syahrinazahara@gmail.com², harijayasinaga1@gmail.com³, nasirwan@unimed.ac.id⁴

Abstrak – Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Sumatera Utara dan meninjau kontribusi pendekatan dakwah dalam memperkuat kesadaran fiskal masyarakat. Data yang digunakan merupakan data sekunder dari Laporan Realisasi PAD Provinsi Sumatera Utara tahun 2019–2021 serta kajian literatur terkait ekonomi Islam, tata kelola keuangan daerah, dan nilai-nilai dakwah. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PAD Provinsi Sumatera Utara masih didominasi oleh retribusi daerah dan pajak daerah, namun mengalami fluktuasi yang signifikan akibat lemahnya sistem pengelolaan dan rendahnya kepatuhan masyarakat. Pendekatan dakwah yang menekankan prinsip amanah, kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab memiliki potensi besar untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi. Integrasi nilai-nilai dakwah dalam sistem pengelolaan PAD diyakini mampu mendorong kemandirian fiskal dan pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Kata Kunci: Pendapatan Asli Daerah, Dakwah, Sumatera Utara, Pajak, Kesadaran Fiskal.

Abstract – This study aims to analyze the sources of Local Own-Source Revenue (PAD) of North Sumatra Province and examine the contribution of a dakwah-based approach in enhancing public fiscal awareness. The research uses secondary data from the Local Revenue Realization Reports of North Sumatra Province for the years 2019–2021, along with literature reviews on Islamic economics, regional financial governance, and dakwah values. The method employed is a descriptive-analytical qualitative approach. The results indicate that North Sumatra's PAD is still largely dependent on regional levies and local taxes but has experienced significant fluctuations due to weak management systems and low public compliance. A dakwah approach emphasizing trustworthiness, honesty, justice, and responsibility holds great potential to improve public awareness in fulfilling tax and levy obligations. The integration of dakwah values into PAD management is believed to encourage fiscal independence and sustainable regional development.

Keywords: Local Own-Source Revenue, Dakwah, North Sumatra, Taxation, Fiscal Awareness.

PENDAHULUAN

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan komponen penting dalam pelaksanaan otonomi daerah. Besarnya PAD mencerminkan sejauh mana suatu daerah mampu menggali dan mengelola potensi yang dimilikinya untuk membiayai kebutuhan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik tanpa bergantung sepenuhnya pada dana transfer dari pemerintah pusat. Kemampuan daerah dalam menghasilkan PAD menjadi indikator kemandirian fiskal yang vital dalam menciptakan daerah yang kuat, berdaya saing, dan mandiri secara ekonomi.

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah, sumber-sumber PAD terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta pendapatan lain yang sah (Panggabean, 2020; Kemendagri, 2023). Di Provinsi Sumatera Utara, PAD menjadi salah satu tumpuan utama untuk mendukung pembiayaan program pembangunan. Sumber utama PAD di provinsi ini mencakup pajak kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, retribusi parkir, serta pendapatan dari pengelolaan aset milik daerah (BPS Sumatera Utara,

2023).

Namun, meskipun terdapat potensi besar dalam sektor-sektor tersebut, realisasi PAD belum menunjukkan hasil yang optimal. Salah satu penyebabnya adalah rendahnya tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi, yang berkaitan erat dengan rendahnya kesadaran fiskal masyarakat, lemahnya pengawasan, serta persepsi negatif terhadap pengelolaan anggaran oleh pemerintah daerah. Halim (2007) dan BPKP (2019) menyebutkan bahwa stagnasi kinerja PAD juga dipengaruhi oleh lemahnya sistem administrasi, rendahnya transparansi, serta akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.

Sejalan dengan itu, penelitian oleh Nasirwan et al. (2024) menunjukkan bahwa pemerintah daerah di Sumatera Utara masih menghadapi berbagai tantangan dalam implementasi sistem akuntansi berbasis akrual. Keterbatasan pemahaman aparatur terhadap prinsip-prinsip akuntansi modern, minimnya keahlian tenaga kerja, serta infrastruktur teknologi informasi yang belum memadai turut menghambat penyusunan laporan keuangan yang akurat dan transparan. Kondisi ini menunjukkan bahwa peningkatan PAD tidak hanya membutuhkan strategi intensifikasi sumber pendapatan, tetapi juga reformasi dalam tata kelola keuangan daerah.

Dalam konteks ini, pendekatan dakwah berbasis nilai-nilai Islam dapat menjadi salah satu alternatif strategis dalam memperkuat penerimaan PAD. Dakwah Islam tidak hanya berfokus pada aspek ritual, melainkan juga mencakup ajakan kepada nilai-nilai sosial dan etika yang mendukung pembangunan, termasuk dalam hal kepatuhan fiskal. Qardhawi (1995) menekankan pentingnya nilai amanah, keadilan, dan tanggung jawab (*mas'uliyah*) dalam pengelolaan keuangan publik. Pendekatan ini dapat menginternalisasi kesadaran bahwa membayar pajak dan retribusi merupakan bagian dari ibadah muamalah yang memiliki nilai spiritual dan kontribusi sosial.

Melalui berbagai sarana dakwah seperti khutbah Jumat, pengajian, edukasi publik, serta dialog antara tokoh agama dan pemerintah, nilai-nilai keimanan dapat dimanfaatkan untuk menumbuhkan kesadaran kolektif dan moral ekonomi masyarakat. Harapannya, masyarakat tidak hanya patuh karena tekanan hukum, melainkan terdorong oleh motivasi keimanan dan tanggung jawab sosial.

Penelitian ini memfokuskan diri pada analisis sumber-sumber PAD di Provinsi Sumatera Utara serta mengevaluasi potensi pendekatan dakwah dalam memperkuat penerimaan PAD. Dengan mengintegrasikan nilai-nilai Islam ke dalam kebijakan fiskal daerah, diharapkan terbentuk budaya pajak yang lebih kuat, masyarakat yang sadar kewajiban, serta peningkatan PAD yang berkelanjutan demi terwujudnya kemandirian daerah yang utuh.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif analitis. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu menggambarkan secara mendalam realitas sosial yang kompleks, khususnya dalam konteks pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dikaitkan dengan nilai-nilai dakwah Islam. Jenis deskriptif analitis memungkinkan peneliti untuk tidak hanya mendeskripsikan fenomena, tetapi juga menganalisis dan menafsirkan hubungan antara variabel-variabel sosial yang terlibat, dalam hal ini antara kesadaran nilai keislaman dan kepatuhan fiskal masyarakat terhadap kewajiban daerah, seperti pajak dan retribusi.

Pendekatan ini sejalan dengan pandangan Moleong yang menyatakan bahwa penelitian kualitatif digunakan untuk memahami fenomena sosial dari perspektif partisipan dan untuk

menghasilkan pemahaman yang mendalam terhadap konteks yang sedang diteliti. Dalam hal ini, peneliti berusaha menggali makna dan nilai dakwah dalam pengelolaan PAD serta bagaimana nilai-nilai tersebut dapat menjadi instrumen peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sumber-Sumber PAD di Provinsi Sumatera Utara

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan indikator utama kemandirian fiskal suatu daerah. Semakin tinggi PAD, semakin besar pula kemampuan daerah untuk membiayai pembangunan dan pelayanan publik tanpa bergantung secara berlebihan pada dana transfer dari pemerintah pusat. Dalam konteks Provinsi Sumatera Utara, data PAD menunjukkan adanya dinamika yang fluktuatif selama tiga tahun terakhir (2019–2021).

Berikut adalah data PAD Provinsi Sumatera Utara berdasarkan empat komponen utama:

Jenis Pendapatan	Realisasi Pendapatan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menurut Jenis Pendapatan (ribu rupiah)		
	2019	2020	2021
Pendapatan Asli Daerah	Rp5.761.270.412	Rp7.583.849.755	Rp5.991.151.366
Pajak Daerah	Rp5.058.443.945	Rp6.087.369.134	Rp5.438.098.178
Retribusi Daerah	Rp38.408.031	Rp36.744.960	Rp30.370.035
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Rp436.284.943	Rp612.177.474	Rp356.265.027
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	Rp228.133.493	Rp847.558.187	Rp166.418.126
Dana Perimbangan	Rp7.300.647.588	Rp7.736.050.763	Rp7.434.780.086
Bagi Hasil Pajak	Rp322.412.068	Rp467.407.684	Rp385.635.062
Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	Rp58.892.050	Rp83.179.994	Rp54.806.667
Dana Alokasi Umum	Rp2.713.750.553	Rp2.713.750.553	Rp2.545.202.693
Dana Alokasi Khusus	Rp4.205.592.917	Rp4.471.712.532	Rp4.449.135.664
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	Rp17.680.635	Rp7.852.000	Rp91.568.000
Pendapatan Hibah	Rp17.680.635	Rp7.852.000	Rp91.568.000
Dana Darurat	-	-	-
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	-	-	-
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	-	-	-
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	-	-	-
Pendapatan Lainnya dari Pemerintah	-	-	-
Jumlah	Rp13.079.598.635	Rp15.327.752.518	Rp13.517.499.452

Sumber: Badan Pusat Statistik Sumatera Utara Tahun 2019-2021

Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa Pajak Daerah merupakan penyumbang terbesar Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Sumatera Utara selama tiga tahun terakhir. Pada tahun 2019, nilai pajak daerah mencapai lebih dari Rp5 triliun, kemudian meningkat pada tahun 2020 menjadi Rp6,08 triliun, namun mengalami penurunan cukup tajam pada tahun 2021 menjadi Rp5,43 triliun. Tren ini menunjukkan adanya ketidakstabilan dalam penerimaan pajak yang bisa saja dipengaruhi oleh kondisi ekonomi masyarakat pasca pandemi, serta efektivitas pengelolaan pajak daerah yang masih perlu diperkuat.

Sementara itu, Retribusi Daerah justru mengalami penurunan yang signifikan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2019, retribusi tercatat sebesar Rp328 miliar, namun turun drastis menjadi hanya sekitar Rp30 miliar di tahun 2021. Penurunan ini dapat mengindikasikan kurang optimalnya penarikan retribusi atas pelayanan publik atau minimnya perbaikan

sistem retribusi yang berdampak pada kontribusinya terhadap PAD. Hal ini juga menunjukkan bahwa potensi retribusi belum dimaksimalkan dan memerlukan reformasi dalam sistem layanan dan tarif yang lebih adil dan transparan.

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan menunjukkan tren yang fluktuatif. Nilainya naik drastis dari Rp436 miliar pada tahun 2019 menjadi Rp612 miliar di 2020, namun kembali turun menjadi Rp356 miliar di tahun 2021. Sementara itu, Lain-lain PAD yang Sah sempat mengalami lonjakan luar biasa pada 2020 (mencapai Rp847 miliar), sebelum akhirnya turun drastis ke Rp166 miliar pada tahun berikutnya. Fluktuasi ini mengindikasikan bahwa kontribusi sektor ini masih belum stabil dan sangat dipengaruhi oleh kebijakan serta efisiensi tata kelola aset daerah. Jika dikelola secara profesional, transparan, dan berkelanjutan, sektor ini sebenarnya dapat menjadi tulang punggung PAD yang kuat.

Pada sisi lain, Dana Perimbangan yang berasal dari pemerintah pusat terus menjadi komponen pendapatan terbesar dalam struktur APBD Provinsi Sumatera Utara. Meskipun terdapat sedikit penurunan dari tahun 2020 ke 2021 (dari Rp7,7 triliun menjadi Rp7,43 triliun), kontribusinya masih lebih besar dibandingkan PAD. Hal ini menunjukkan ketergantungan yang tinggi terhadap transfer pusat, yang menandakan bahwa kemandirian fiskal daerah masih belum tercapai secara optimal.

Adapun Pendapatan Hibah serta komponen lain seperti Dana Darurat dan Dana Penyesuaian tidak mengalami perubahan signifikan dan cenderung stagnan. Ini mengindikasikan bahwa sumber pendanaan tersebut belum dimanfaatkan secara maksimal oleh pemerintah daerah.

Secara keseluruhan, total pendapatan daerah meningkat dari Rp13,07 triliun pada 2019 menjadi Rp15,32 triliun pada 2020, namun kembali menurun menjadi Rp13,51 triliun pada 2021. Pola ini memperlihatkan adanya pengaruh signifikan dari kondisi eksternal, khususnya pandemi COVID-19, terhadap pendapatan daerah. Oleh karena itu, penting bagi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk memperkuat sektor-sektor potensial, meningkatkan kesadaran dan kepatuhan fiskal masyarakat, serta menerapkan prinsip good governance dalam pengelolaan keuangan daerah yang berpadu dengan nilai-nilai keislaman, agar tercipta kemandirian fiskal yang berkelanjutan.

Kritikalitas Terhadap Kinerja PAD

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan indikator penting kemandirian fiskal suatu daerah. Secara teori, semakin besar kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah, semakin mandiri pula daerah tersebut dalam membiayai pembangunan dan operasional pemerintahan. Namun, berdasarkan data dari Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2019 hingga 2021, terdapat beberapa persoalan yang dapat dikritisi secara substansial, baik dari sisi kuantitas, stabilitas, maupun struktur komponen PAD itu sendiri.

1. Fluktuasi Tajam PAD Mencerminkan Ketidakstabilan Fiskal

Realisasi PAD pada tahun 2019 sebesar Rp5,76 triliun melonjak tajam menjadi Rp7,58 triliun pada tahun 2020, namun kembali merosot signifikan ke Rp5,99 triliun di tahun 2021. Penurunan ini menunjukkan bahwa PAD Sumatera Utara belum dikelola secara konsisten dan stabil. Kinerja PAD yang fluktuatif dapat menjadi sinyal bahwa:

- Ketergantungan terhadap sektor-sektor tertentu masih tinggi.
- Sistem pengumpulan dan pengelolaan pajak/retribusi belum optimal.
- Ketahanan fiskal terhadap faktor eksternal (seperti pandemi, perlambatan ekonomi, atau ketidakpastian regulasi) masih rendah.

Dengan kata lain, daerah belum memiliki struktur pendapatan yang tangguh untuk menghadapi dinamika ekonomi.

2. Kinerja Pajak Daerah dan Retribusi Masih Belum Maksimal

Dua sumber utama PAD yaitu Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menunjukkan performa yang kurang stabil dan cenderung menurun. Pajak Daerah, misalnya, yang pada 2020 mencapai Rp6,08 triliun, turun menjadi Rp5,43 triliun pada 2021. Hal ini mengindikasikan adanya penurunan tingkat kepatuhan wajib pajak, lemahnya pengawasan, dan kemungkinan potensi kebocoran yang tinggi dalam sistem pemungutan pajak.

Retribusi Daerah pun tak kalah memprihatinkan. Pada 2020 mencapai Rp36,7 miliar, tapi kembali turun ke Rp30,3 miliar pada 2021. Nilai ini sangat kecil dibandingkan potensi yang seharusnya bisa digali dari berbagai pelayanan publik seperti parkir, pasar tradisional, layanan kesehatan, dan sebagainya. Padahal, retribusi adalah bentuk pembiayaan yang bersifat langsung dan berkelanjutan yang bisa ditingkatkan dengan pelayanan yang lebih baik.

3. Minimnya Diversifikasi Sumber PAD

Struktur PAD Sumatera Utara masih sangat tergantung pada Pajak Daerah. Sumber lainnya seperti:

- Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan,
- Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, masih menyumbang dalam jumlah kecil dan belum berkembang secara signifikan.

Ini mencerminkan bahwa inovasi dalam pengelolaan aset daerah maupun optimalisasi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) belum berjalan maksimal. Banyak potensi aset daerah yang mungkin belum dimonetisasi secara efisien atau belum dikelola secara profesional sesuai prinsip tata kelola yang baik (*good corporate governance*).

4. Tingginya Ketergantungan terhadap Dana Transfer Pusat

Kinerja PAD yang lemah berimbas pada tingginya proporsi dana transfer dari pemerintah pusat (Dana Perimbangan, Dana Alokasi Khusus, dan lain-lain). Artinya, otonomi fiskal Provinsi Sumatera Utara masih lemah, karena lebih dari separuh anggaran bergantung pada pusat. Ketergantungan ini bisa menimbulkan risiko keberlanjutan program daerah jika terjadi perubahan kebijakan fiskal nasional.

5. Minimnya Peran Masyarakat dan Kurangnya Edukasi Fiskal

Tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan fiskal daerah masih rendah. Hal ini dapat terlihat dari tingkat kepatuhan pajak yang belum optimal, minimnya transparansi dalam penggunaan dana publik, serta rendahnya edukasi fiskal di tingkat akar rumput. Kepercayaan masyarakat kepada pemerintah daerah dalam mengelola dana juga menjadi faktor penghambat peningkatan PAD.

Peluang Penguatan PAD melalui Pendekatan Dakwah

Peluang penguatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pendekatan dakwah sangat relevan dalam konteks daerah yang memiliki basis masyarakat religius seperti Provinsi Sumatera Utara. Pendekatan dakwah, khususnya dalam perspektif ekonomi Islam, dapat menjadi strategi non-struktural yang bersifat kultural dan moral untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan memperbaiki tata kelola fiskal daerah. Berikut adalah analisis peluang tersebut secara mendalam:

1. Meningkatkan Kesadaran dan Kepatuhan Pajak melalui Edukasi Berbasis Nilai Islam

Dakwah yang menyampaikan pentingnya taat membayar pajak dan retribusi sebagai bentuk kontribusi sosial dan kewajiban moral dapat meningkatkan kesadaran fiskal umat. Dalam Islam, membayar kewajiban kepada negara—selama tidak bertentangan dengan syariat—adalah bagian dari bentuk ketaatan sosial dan kontribusi kepada kemaslahatan umat.

- Dalil-dalil Islam tentang pentingnya kontribusi sosial seperti zakat, infaq, dan sedekah dapat dijadikan analogi moral untuk membayar pajak dan retribusi.
- Penguatan narasi ini melalui khutbah, pengajian, dan media dakwah lokal berpotensi menumbuhkan budaya taat pajak sebagai bentuk ibadah.

2. Optimalisasi Zakat dan Ekonomi Syariah untuk Mendorong PAD Non-Pajak

Meski zakat tidak langsung menjadi PAD, namun pengelolaan zakat yang produktif akan:

- Meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat, sehingga kemampuan bayar retribusi meningkat.
- Mengurangi beban APBD untuk program pengentasan kemiskinan.
- Memberdayakan UMKM dan ekonomi lokal, yang secara tidak langsung dapat meningkatkan PAD melalui izin usaha, retribusi pasar, atau kerja sama usaha daerah.

Pemerintah daerah dapat bekerja sama dengan BAZNAS atau lembaga amil zakat lokal untuk mendorong integrasi program ekonomi keumatan berbasis zakat dan wakaf produktif.

3. Dakwah Sebagai Instrumen Pemberdayaan dan Etika Ekonomi

Pendekatan dakwah yang berfokus pada pemberdayaan ekonomi umat dapat meningkatkan kapasitas usaha masyarakat, khususnya UMKM. Dalam jangka panjang:

- Kinerja sektor informal menjadi lebih formal dan terdata, sehingga bisa dikenakan pajak dan retribusi secara adil.
- Tumbuhnya kesadaran untuk mengurus izin usaha, membayar pajak usaha, dan berpartisipasi aktif dalam sistem ekonomi lokal.

Dakwah juga dapat memperkuat etika dalam transaksi, menghindari korupsi dan manipulasi pajak, serta membentuk kultur ekonomi yang bersih dan adil, yang sangat mendukung penguatan PAD dari sisi tata kelola.

4. Kolaborasi antara Da'i dan Pemerintah Daerah

Pemerintah daerah dapat:

- Melibatkan ulama, ustaz, dan tokoh agama dalam program penyuluhan fiskal.
- Menjadikan masjid sebagai pusat edukasi keuangan masyarakat, termasuk program sadar pajak, pembinaan UMKM, dan edukasi pengelolaan keuangan keluarga.

Kolaborasi ini bukan hanya menciptakan keterhubungan antara pemerintah dan masyarakat, tetapi juga membangun kepercayaan publik terhadap kebijakan fiskal.

5. Dakwah di BUMD dan Institusi Pemerintah Daerah

Melalui dakwah internal di kalangan ASN dan pengelola BUMD, nilai-nilai amanah, profesionalisme, dan tanggung jawab dalam mengelola keuangan negara dapat diperkuat. Jika ASN dan aparat daerah menunjukkan integritas tinggi dalam mengelola keuangan daerah, maka:

- Kebocoran PAD bisa ditekan.
- Transparansi meningkat.
- Masyarakat akan lebih percaya untuk membayar pajak dan retribusi.

KESIMPULAN

Penelitian Penelitian ini menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Sumatera Utara masih menghadapi berbagai tantangan, baik dari sisi kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi, maupun dari kelemahan dalam tata kelola yang optimal. Data dari tahun 2019 hingga 2021 mengindikasikan adanya fluktuasi signifikan pada beberapa komponen PAD, seperti retribusi daerah dan pajak daerah, yang mencerminkan ketidakstabilan pendapatan serta ketergantungan pada kondisi eksternal.

Pendekatan dakwah yang mengedepankan nilai-nilai Islam seperti amanah, keadilan, tanggung jawab (mas'uliyah), dan transparansi, memiliki potensi besar dalam memperkuat kesadaran fiskal masyarakat. Dengan integrasi nilai-nilai dakwah ke dalam tata kelola keuangan daerah, diharapkan dapat tercipta masyarakat yang tidak hanya patuh secara administratif, tetapi juga memiliki kesadaran spiritual dan sosial dalam mendukung pembangunan daerah melalui kontribusi pajak dan retribusi.

Salah satu tokoh teladan dalam hal ini adalah Umar bin Khattab, khalifah kedua dalam sejarah Islam, yang dikenal akan ketegasannya dalam menegakkan keadilan dan transparansi pengelolaan keuangan publik. Dalam kepemimpinannya, Umar mencontohkan bagaimana prinsip amanah dan tanggung jawab dalam pengelolaan baitul mal (kas negara) diterapkan dengan ketat dan penuh integritas, hingga mampu meningkatkan kepercayaan dan partisipasi rakyat dalam pembangunan. Semangat kepemimpinan seperti inilah yang relevan untuk diadopsi dalam konteks pemerintahan daerah masa kini, terutama dalam membangun sistem fiskal yang etis dan bertanggung jawab.

Melalui pemahaman dan penerapan nilai-nilai dakwah secara konsisten dalam sistem pemerintahan, PAD tidak hanya dapat ditingkatkan secara kuantitatif, tetapi juga dikelola dengan lebih etis dan berkelanjutan. Untuk itu, pemerintah daerah disarankan melibatkan tokoh agama dalam program edukasi fiskal, memperkuat kapasitas aparatur melalui pelatihan yang menanamkan nilai-nilai integritas, serta membangun sistem pengawasan yang transparan. Dengan cara ini, semangat otonomi daerah akan benar-benar mendorong kemandirian fiskal yang selaras dengan nilai keadilan dan kesejahteraan bersama.

DAFTAR PUSTAKA

- Anafarhanah, S., Dakwah, F., Komunikasi, D., & Antasari, I. (2015). Peran ekonomi Islam dalam dakwah Nabi Muhammad SAW. *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*, 14(28).
Departemen Agama Republik Indonesia. (2005). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Departemen Agama RI.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara. (2022, Juni 28). Realisasi pendapatan pemerintah Provinsi Sumatera Utara menurut jenis pendapatan (ribu rupiah), 2019–2021.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (n.d.). Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat tahun 2019: Laporan hasil reviu atas kemandirian fiskal pemerintah daerah tahun anggaran 2018 dan 2019.
- Bariyyatin Nafi, K., & Herianingrum, S. (2021). Implementasi nilai-nilai Islam dalam distribusi. *Jurnal Ekonomi Islam*, 12(1).
- Fitria, R., Asnawi, B., Roni, M., & Anwar, K. (n.d.). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan asli daerah di kabupaten/kota Provinsi Sumatera Utara. Hatimah, H., & Kurniawan, R. (n.d.). *Integrasi dakwah dan ekonomi Islam*.
- Panggabean, F. Y. (2020). Analisis Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Sumatera Utara. *Jurnal Ilmu Ekonomi*.
- Mardiasmo. (2002). *Akuntansi sektor publik*. Yogyakarta: Andi.
- Badan Pemeriksa Keuangan. (2022). *Ikhtisar hasil pemeriksaan daerah (IHPD) Provinsi Sumatera Utara tahun 2021*.
- Lubis, A. T. (n.d.-a). *Sekretariat: Program Studi Perbankan Syariah STAIN Madina, Sumatera Utara, Indonesia*.
- Mun, M., & Nur, E. (2017). Dakwah sosial ekonomi dalam pandangan Dawam Raharjo. *Dakwah Sosial Ekonomi Dalam Pandangan Dawam Rahardjo*, 37(1).
- Nasution, S., Amsari, S., & Munasip, A. (n.d.). Analisis pengaruh pendapatan asli daerah Provinsi Sumatera Utara dalam menyejahterakan rakyat dalam kajian perspektif ekonomi Islam.
- Qardhawi, Y. (1995). *Nilai dan Moral Islam dalam Ekonomi dan Keuangan Publik*. Kairo: Maktabah Wahbah.

- Pane, Y., Simarmata, A. M., Rezeki, S., Rinaldi, M., & Panggabean, F. Y. (n.d.). Analisis pendapatan asli daerah dan dana perimbangan terhadap belanja modal pada pemerintah kabupaten/kota di Sumatera Utara.
- Romy, E., Simamora, N., & Wahyudin, D. (2024). 388. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 4(4).
- Abu Ubaid al-Qasimi. (2022). *Konsep Kebijakan Keuangan Publik Islam*. Tesis. Institut PTIQ Jakarta.
- Sania, N., Alwaali, A. S., Anwar, Z., Fithri, A., Asmara, C. G., Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bina Sarana Informatika. (n.d.). *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 27(1), Nomor 01, Maret 2024.
- Setiawan, A. I. (2014). Dakwah berbasis pemberdayaan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan mad'u. *Ilmu Dakwah: Academic Journal for Homiletic Studies*, 6(2), 347–362.
- Moleong, L. J. (2013). *Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. ISBN: 979-514-051-5.
- Abduh, M. (2018). Dakwah sosial ekonomi dalam pandangan Dawam Rahardjo. *Jurnal Ilmu Dakwah*, 38(2).
- Amin, M. (2020). Integrasi dakwah dan ekonomi Islam. *Qardhul Hasan: Media Pengabdian Kepada Masyarakat*, 6(1).
- Fauziah, S. (2022). Dakwah sebagai pendorong pembangunan ekonomi berkelanjutan. *Al-Mi'raj: Jurnal Dakwah dan Komunikasi*, 10(1).
- Hasibuan, R. A. (2016). Dakwah berbasis pemberdayaan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan umat. *Jurnal Ekonomi dan Dakwah*, 8(2).
- Munawar, I. (2020). Analisis keuangan publik syariah terhadap pengelolaan keuangan daerah. *I-Economics: Journal of Islamic Economics*, 6(2).
- Nurfajriah, L. (2019). Peran ekonomi Islam dalam dakwah Nabi Muhammad SAW. *Al-Hadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*, 17(1).
- Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. (2021). *Catatan atas laporan keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara tahun anggaran 2021*.
- Rahmatillah, D. (2022). Dakwah sosial dan filantropi Islam. *Jurnal Studi Dakwah*, 5(1).